

## BELA BELI KULON PROGO SEBAGAI SEBUAH MODEL *ENDOGENOUS DEVELOPMENT*

**Indra Cahya Nugraha<sup>1</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>, Endriana Prasetyawati<sup>3</sup>, Belia Fransiska<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

<sup>1</sup>indra.cahyanugraha@gmail.com; <sup>2</sup>sitifatimahnurfalah@gmail.com;

<sup>3</sup>endrianap@gmail.com; <sup>4</sup>beliafransiska383@gmail.com

*Diterima: Mei 2022; Disetujui: Juli 2022*

**Abstract.** *Regional inequality and poverty are common problems for almost every developing country. Yogyakarta Special Region is a region equal to a province with the highest regional inequality rate in Indonesia. Endogenous development can be a solution to address inequality and poverty, but only some regions that implement this method are prosperous. This research used qualitative description to elaborate the endogenous development model in the case of Kulon Progo Regency with analysis referring to elements of the endogenous development frame. Results showed that innovation and implementation of endogenous development in the Kulon Progo Regency called “Bela Beli Kulon Progo,” positively impacted poverty alleviation.*

**Keywords:** *endogenous development, local economy.*

**Abstraksi.** *Ketimpangan wilayah dan kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh hampir seluruh negara berkembang. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah administratif setingkat provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Pembangunan endogen bisa menjadi salah satu solusi mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, namun tidak semua wilayah yang menerapkan pembangunan endogen mampu memberikan pengaruh positif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan pembangunan model endogen dalam kasus Kulon Progo dengan analisis mengacu pada elemen-elemen kerangka pembangunan endogen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inovasi dan penerapan pembangunan endogen yang dilakukan dalam bentuk program “Bela Beli Kulon Progo” memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.*

**Kata Kunci:** *ekonomi lokal, pembangunan endogen.*

### PENDAHULUAN

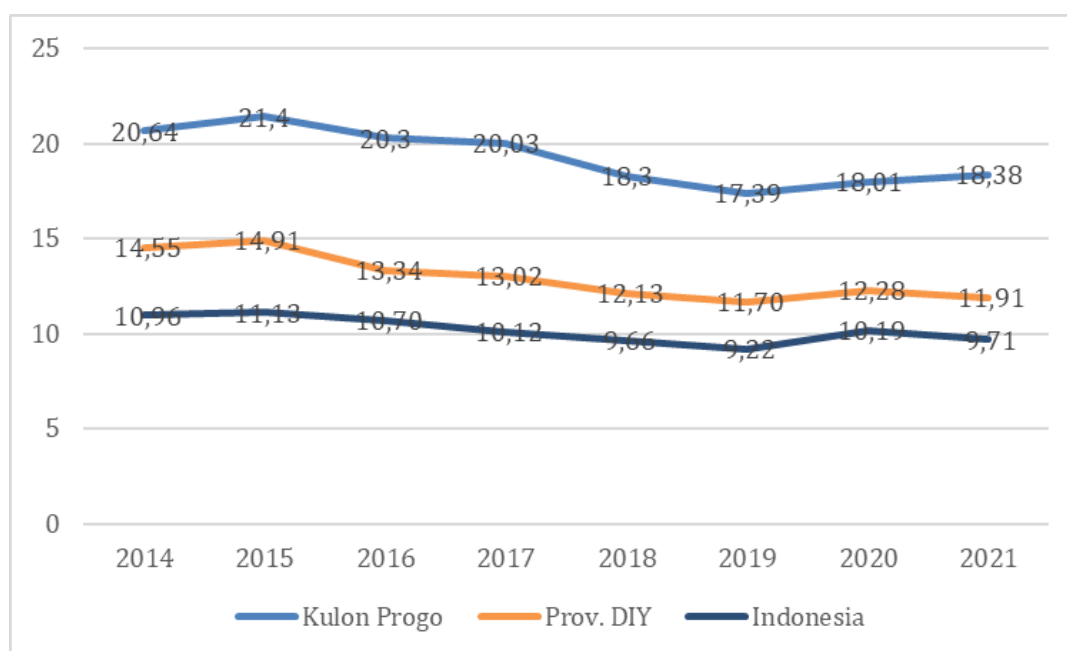
Berlakunya otonomi daerah di Indonesia cenderung menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah. Ketimpangan pendapatan suatu wilayah umumnya diukur dengan indeks gini, dengan nilai yang tertinggi tahun 2021 di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 0,441 (moderat) jauh di atas indeks gini Indonesia pada 0,381. Begitu pula dengan indeks Williamson tahun 2018 DIY yang menunjukkan angka 0,4766 termasuk kategori ketimpangan sedang. Ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat polarisasi

pertumbuhan yang umum terjadi di daerah yang sedang berkembang. Gunnar Myrdal pertama kali mengemukakan teori polarisasi ekonomi atau pusat pertumbuhan pada tahun 1957 dan hingga masa kini cenderung masih relevan. Polarisasi pertumbuhan tidak selamanya berpengaruh positif, Vados dan Chatzinikolaou (2020) menemukan bahwa teori pusat pertumbuhan terlalu berfokus kepada pengembangan wilayah dan isu “kuantitatif” sehingga berpengaruh terhadap peningkatan daya saing. Sebaliknya pertumbuhan yang terlalu berfokus ini akan mengakibatkan ketimpangan wilayah untuk

daerah-daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan (Vlados dan Chatzinikolaou, 2020).

Dalam wilayah administratif DIY, Kabupaten Kulon Progo berada pada jarak 30 kilometer dari pusat pertumbuhan Kota Yogyakarta sehingga efek menetes ke bawah (*trickling down effect*) dari pusat pertumbuhan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Susilo dan Rijanta (2017) menyebutkan bahwa Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten yang mengalami kebocoran, hal ini disebabkan karena Kelurahan Wates sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa bagi kecamatan lainnya. Secara ekonomi, kerugian akibat kebocoran ini terjadi karena masyarakat yang memiliki pekerjaan di Kulon Progo memilih untuk berbelanja kebutuhannya di luar Kulon Progo.

Keluarnya uang dari masyarakat Kulon Progo ke luar daerah ini mengakibatkan produsen barang dan jasa di Kulon Progo kehilangan pasar di daerahnya sendiri. Kebocoran perekonomian di Kulon Progo ini mendatangkan permasalahan tersendiri, hasil penelitian Retnandari (2017), perekonomian lokal Kulon Progo didominasi oleh perdagangan dan investasi dari masyarakat lokal Kulon Progo sendiri, akan tetapi hal ini tidak didukung oleh *entrepreneurship* yang baik sehingga sangat rentan terhadap persaingan bisnis dari luar wilayah (Retnandari, 2017). Kedua hal tersebut menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY yaitu 18,38% cukup jauh di atas persentase DIY 11,91% maupun nasional 9,71%. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Persentase Kemiskinan Kulon Progo, DIY dan Indonesia.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2022 (data diolah)

Tingginya persentase kemiskinan menjadi salah satu latar belakang munculnya inovasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Pada tanggal 23 Maret 2013, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo

melakukan deklarasi “Bela Beli Kulon Progo”. Kebijakan ini merupakan pendekatan sederhana untuk memperkuat pasar lokal, yaitu membela Kulon Progo dengan cara membeli produk-produk Kulon

Progo. Nugroho (2020) menekankan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi produk unggulan, namun belum dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya *entrepreneurship* (Nugroho, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Qowim (2020), pembangunan desa endogen di Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 24% dan IPM meningkat sebesar 1,76%. Berlawanan dengan hal tersebut, Rizkwanti (2017) membuktikan adanya pembangunan endogen yang berpengaruh negatif terhadap pembangunan daerah. Kedua penelitian tersebut memiliki kontradiksi hasil di wilayah penelitiannya, sehingga menunjukkan pembangunan endogen harus dianalisis berdasarkan konteks wilayahnya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dorongan untuk melihat pengaplikasian pembangunan endogen di Kulon Progo. Inovasi pembangunan endogen di Kulon Progo diwakili oleh Program Bela Beli Kulon Progo yang menciptakan pasar bagi produsen lokal Kulon Progo. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana implementasi inovasi model pembangunan endogen di Kabupaten Kulon Progo dan pengaruhnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi model pembangunan endogen yang dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo dan dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Model pembangunan endogen Kulon Progo dianalisis menggunakan kerangka pembangunan endogen kemudian efek dari program ini dinilai dengan parameter penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. Manfaat penelitian ini untuk akademik antara lain: (1) sebagai tambahan referensi bagi para peneliti yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut pada tema sejenis; (2) memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai sebuah model pembangunan endogen yang sudah diimplementasikan; (3) memberikan tambahan referensi bagi pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembangunan endogen yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan manfaat penelitian untuk *stakeholder* adalah: (1) menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya dan pemerintah daerah lain dalam melaksanakan program pembangunan endogen; (2) memberikan tambahan perspektif dalam penyusunan strategi bisnis untuk dunia usaha; (3) menambah referensi model pembangunan endogen bagi perencana baik perencana publik maupun pemerintah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dari data sekunder yang didapatkan berupa jurnal, artikel, berita, dan dokumen-dokumen resmi Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan program Bela Beli Kulon Progo. Data sekunder yang terkumpul diolah dan dianalisis berdasarkan kerangka *endogenous development* (Stimson, 2011) untuk menjelaskan pembangunan endogen yang dilakukan Kabupaten Kulon Progo.

Penggunaan metode ini untuk menjawab tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu mengetahui apakah model pembangunan endogen yang sudah diimplementasikan, yaitu program Bela Beli Kulon Progo, dapat menurunkan tingkat kemiskinan Kulon Progo.

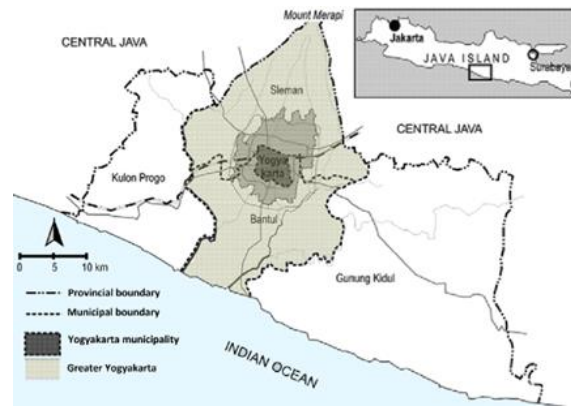
Pada penelitian ini, penulis melakukan analisa mengacu pada elemen-elemen yang terdapat pada kerangka *endogenous development* (Stimson, 2011) yaitu:

1. *Quasi-Independent Variables*  
Sumber daya dan kondisi pasar yang terdapat di wilayah tersebut
2. *Intervening Variables*  
*Intervening variable* adalah variabel yang mampu mengkonversi *Quasi-Independent Variables* berupa *Resource Endowments and Market Condition* (REM) menjadi suatu *outcome* yang kompetitif. Di mana di sini terdapat proses yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. Faktor yang paling menentukan dampak adalah *Institutions, Leadership,* dan *Entrepreneurship*.
3. *Dependent Variable*  
*Outcome* yang hasilnya bergantung pada proses yang terjadi di *intervening variable*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota dengan pusat pertumbuhannya berada pada ibukota yaitu Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang sudah terdampak proses mengkota (*urbanisasi*) mulai mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan persentase kemiskinan Kabupaten Sleman adalah 8,64% dan Kabupaten Bantul pada 14,04%. Tingkat kemiskinan di 2 Kabupaten lain yaitu Kabupaten Gunungkidul pada 17,69% dan Kabupaten Kulon Progo pada 18,38% yang masih tinggi terjadi akibat letak geografis kedua kabupaten yang jauh dari pusat pertumbuhan yaitu Kota Yogyakarta. Peta pertumbuhan DIY dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Pertumbuhan DIY

Sumber:

<https://www.semanticscholar.org/paper/Metropolitan-Transport-Planning-Collaboration>

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan memiliki kecenderungan pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yogi, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa wilayah perkotaan yang memiliki *central business district* (CBD) akan mengundang usaha ekonomi yang bernilai lebih tinggi seperti kawasan perdagangan dan perkantoran serta kawasan industri. Dalam model Von Thunen, lokasi lahan yang paling jauh dari CBD atau pusat pertumbuhan adalah lahan pertanian karena nilai produktivitasnya yang paling rendah (Yogi, dkk., 2017). Ketimpangan wilayah sangat umum terjadi akibat perbedaan nilai ekonomi tiap wilayah. Kabupaten Kulon Progo yang berada cukup jauh dari pusat pertumbuhan mengalami kendala rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Jika dilihat lebih dalam, ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten kota di DIY juga sangat tajam. Kota Yogyakarta mencapai 61,97 juta rupiah sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 18,04 juta rupiah, disusul Kabupaten Bantul pada 18,29 juta rupiah dan Kabupaten Kulon Progo dengan 19,37 juta rupiah (BPS DIY, 2021). PDRB per kapita

tertinggi mencapai 3 kali lipat dari yang terendah,

Permasalahan pada ketimpangan wilayah dan kemiskinan mendorong Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan inovasi pembangunan endogen yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat keluar dari permasalahan kemiskinan.

## **Kerangka *Endogenous Development***

### **1. *Quasi-Independent Variables***

Dalam elemen-elemen kerangka pembangunan endogen oleh Stimson (2011), elemen ini merupakan elemen yang terbentuk dari sumber daya dan kondisi pasar di wilayah itu sendiri.

#### **1.1 Sumber Daya Lokal**

Menurut Theresia, *dkk.*, dalam Sari (2014) sumber daya merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses kegiatan. Sumber daya lokal adalah sumber daya yang berasal, tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batasan geografis komunitas (Theresia dalam Sari, 2019).

Klasifikasi sumber daya lokal menjadi 3 jenis yaitu sumber daya manusia, meliputi perilaku, sikap mental, pengetahuan, keterampilan, karakter, pendidikan dan kesehatan. Kedua, sumber daya alam meliputi ekosistem alam, flora dan fauna. Ketiga sumber daya sosial meliputi kelembagaan, modal sosial, kearifan lokal, orientasi nilai budaya dan sentimen komuniti (Santosa dalam Sari, 2019).

##### **1.1.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia di Kabupaten Kulon Progo secara umum mengalami peningkatan kualitas yang stabil jika dilihat dengan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan instrumen penilaian kualitas sumber daya manusia dengan komponen utama pendidikan dan kesehatan.

Indikator pengukurannya adalah usia harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita (PRKap). Ukuran sebelum gerakan Bela Beli Kulon Progo dilaksanakan hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo 2012-2017-2021

Uraian	2012	2017	2021
UHH (tahun)	74,87	75,06	75,27
HLS (tahun)	12,87	14,23	14,27
RLS (tahun)	7,93	8,64	9,02
PRKap (Rp 000)	8.342	9.277	10.069
IPM (nilai)	69,74	73,23	74,71

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan IPM terjadi dengan cukup signifikan dari tahun 2012 pada 69,74 menjadi 73,23 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 3,49 angka. IPM tahun 2012 pada 69,74 cukup tinggi jika diperbandingkan dengan rata-rata nasional pada 67,7. Hal ini menjadi modal awal yang cukup baik untuk pelaksanaan pembangunan endogen karena sumber daya manusia di Kabupaten Kulon Progo berada pada tingkatan di atas rata-rata nasional.

##### **1.1.2 Sumber Daya Alam**

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Kulon Progo sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakatnya dengan proses pengolahan dan pemasaran untuk memberikan nilai tambah. Potensi sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan tersebut yaitu:

###### **a. Air**

Sumber daya alam dalam bentuk air di Kulon Progo cukup besar. Berdasarkan Widiyantoro (2019), hasil pemetaan

zonasi potensi air tanah di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo terbagi atas 5 kelas, yaitu kelas sangat tinggi seluas 7.854,36 Ha (13,36%), tinggi seluas 12.216,56 Ha (20,77%), sedang seluas 17.663,87 Ha (30,03%), rendah seluas 17371,41 Ha (29,54%), dan sangat rendah seluas 3.704,45 Ha (6,30%) (Widiyantoro, 2019). Potensi tersebut dioptimalkan oleh Kabupaten Kulon Progo melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun menjadi air minum kemasan dengan merk dagang AirKu atau Air Kulon Progo. Menurut Retnandari (2017), hal ini didorong oleh tingginya konsumsi air minum kemasan masyarakat Kulon Progo yang mencapai rata-rata 3 gelas air minum kemasan setiap hari (Retnandari, 2017).

b. Beras

Hasil pertanian terutama beras menjadi produk yang mudah dijual mengingat nasi merupakan makanan pokok bagi penduduk Pulau Jawa. Dalam PDRB tiap sektor di Kabupaten Kulon Progo yang dirilis oleh BPS tahun 2021, dijelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi dengan 1,24 triliun rupiah atau mencapai 16,4% dari distribusi PDRB tiap sektor (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2022). Produksi beras di Kulon Progo pada tahun 2021 juga cukup tinggi dengan 122 ribu ton dan produktivitas mencapai 66,29 kuintal/ Ha (Pemkab Kulon Progo, 2022).

c. Gula Kelapa

Salah satu hasil pertanian yang sudah masuk dalam kategori agroindustri di Kulon Progo adalah gula kelapa dengan hasilnya adalah gula semut. Program

diversifikasi industri gula nasional yang berbasis *palmae* seperti gula kelapa sangat strategis peranannya sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah dan masyarakat terhadap gula tebu dan gula sintetis yang sebagian besar masih impor (Putri, 2016). Berdasarkan Putri (2016), 66.865 rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo memiliki profesi sebagai pengrajin gula kelapa. Populasi tanaman kelapa di Kulon Progo juga cukup besar mencapai 56% dari populasi kelapa di DIY (Putri, 2016). Merbawani dan Rijanta (2016) menemukan bahwa tanah *lathosol* yang banyak terdapat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan tanah yang cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, jagung, umbi-umbian, karet, kelapa sawit, kelapa, cengkeh, dan kopi. Di lain pihak, tantangannya adalah penyediaan air untuk tanaman, karena kondisi ketersediaan air di daerah tersebut tidak mudah (Merbawani dan Rijanta, 2016).

### 1.1.3 Sumber Daya Sosial

Gerakan Bela Beli Kulon Progo berhasil meningkatkan sumber daya sosial menjadi sebuah gerakan kolaboratif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Bentuk optimalisasi sumber daya sosial pada gerakan Bela Beli Kulon Progo yaitu:

a. Gotong Royong Bedah Rumah

Gotong royong merupakan salah satu bentuk modal sosial. Penelitian lapangan oleh Hikmawati dan Gutomo (2016) menemukan bahwa kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat juga turut melibatkan aparatur sipil, TNI, Polri yang bermitra dengan dunia usaha dan lembaga keuangan. Keterlibatan masing masing pihak yang terkait disesuaikan

dengan kewenangannya dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Hikmawati dan Gutomo, 2016). Selain bergotong royong, pelaksanaan bedah rumah ini juga dibiayai oleh zakat dan dana persembahan dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

b. Optimalisasi Zakat dan Dana Persembahan

Selain gotong royong dalam pembangunan fisik, gotong royong dalam bentuk iuran dana zakat untuk pemeluk agama Islam dan dana persembahan untuk pemeluk agama selain Islam juga dihimpun dan disalurkan oleh Kulon Progo melalui Baznas untuk zakat dan paguyuban untuk dana persembahan. Hakim dan Rahmat (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada tahun 2018, rata-rata zakat dan dana persembahan yang dapat dihimpun adalah sebesar 15 miliar rupiah setiap tahunnya. Pengumpulan dan penyaluran zakat dan dana persembahan secara legal juga sudah dipayungi oleh Surat Edaran Bupati Kulon Progo nomor 450/1688 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Zakat, Dana Persembahan atau Dana Sosial Lainnya.

c. Optimalisasi Konsumsi Produk Lokal

Gerakan Bela Beli Kulon Progo, secara sederhana adalah metode intervensi pasar dengan ideologi yang disebarluaskan kepada masyarakat Kulon Progo untuk mengkonsumsi produk dari Kulon Progo sendiri. Secara umum berdasarkan penelitian Retnandari (2017) pemasaran produk lokal seperti AirKu, beras daerah, batik, dan gula semut mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Retnandari, 2017). Dalam perspektif sumber daya sosial, gerakan Bela Beli Kulon Progo

mampu mendorong masyarakat Kulon Progo untuk bergotong royong membeli produk lokal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

## 1.2 Kondisi Pasar

Stimson *et al.* (2011) mengemukakan bahwa pembangunan endogen pada prinsipnya bertujuan untuk menstimulasi usaha-usaha kecil di wilayah untuk mensuplai pasar lokal, di samping itu juga menciptakan ketertarikan dan meningkatkan konsumsi wilayah luar terhadap barang dan jasa hasil produksi wilayah tersebut (Stimson *et al.*, 2011). Memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh pasar lokal masih merupakan langkah pertama dalam pembangunan endogen, masih ada langkah selanjutnya yaitu memasarkan barang dan jasa ke pasar luar misalnya wilayah-wilayah yang berada di sekitar Kabupaten Kulon Progo.

Pasar internal di wilayah Kabupaten Kulon Progo cukup baik dalam menyerap barang dan jasa produksi masyarakatnya. Retnandari (2017) menyatakan bahwa sumber daya lokal yang sudah melalui proses pemberian nilai tambah seperti AirKu, beras daerah, dan batik sudah diserap dengan baik oleh pasar lokal dengan peningkatan tiap tahun yang stabil namun mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19 (Retnandari, 2017; Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2022). Produk lain yaitu batu andesit dan gula semut juga mengalami peningkatan dari penjualannya namun 2 produk ini memiliki penjualan yang lebih besar untuk pasar luar daerah (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2022).

## 2. Intervening Variables

### 2.1 Institutions

Menurut Barquero (2002) institusi dapat mengkondisikan proses akumulasi modal

pembangunan suatu wilayah, hal tersebut dikarenakan bahwa institusi dapat meningkatkan kapasitas kewirausahaan serta memperkuat jaringan dan kerjasama antar aktor. Faktor institusi mencakup berbagai aspek pemerintahan dan tata kelolanya, tidak hanya merujuk pada peran sektor publik tetapi juga sektor swasta, LSM, aktor dan struktur masyarakat. Aktor merupakan sebuah lembaga, kelompok, atau individu yang memainkan peran utama dalam suatu sistem (Rees dan MacDonell, 2017). Jejaring antar aktor dalam institusi menjadi kunci yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif antar aktor yang memicu terciptanya inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi wilayah (Stimson *et., al*, 2006). Iklim kolaborasi ini perlu adanya dukungan antar aktor baik dari pemerintah, akademisi, komunitas, serta pelaku usaha.

Program Bela Beli Kulon Progo diinisiasi oleh Bupati Hasto Wardoyo pada tahun 2013 yang didasari atas permasalahan rendahnya kesejahteraan, tingginya kemiskinan, dan kesenjangan yang tinggi. Bupati selain sebagai perumus ide juga berperan sebagai pencetus ide dan penyusun program; memelopori pelaksanaan program; pengarah; hingga evaluator. Dalam penyusunan konsep pelaksanaannya, bupati berkonsultasi dengan Dewan Riset Daerah yang merupakan aktor-aktor dari perguruan tinggi. Selanjutnya pada tahap implementasi kebijakan, bupati dibantu oleh beberapa organisasi perangkat daerah, diantaranya Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, serta kolaborasi dengan BUMD. Selain itu juga terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo sebagai institusi diantaranya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal serta Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern.

Program Bela Beli Kulon Progo mempunyai beberapa produk yang dihasilkan dari jejaring antar institusi yaitu BerasKu, AirKu, Batik Geblek Renteng, Gula Semut, dan produk-produk hasil dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Program Bela Beli Kulon Progo ini menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal Kabupaten Kulon Progo. Dalam proses pelaksanaan jual beli barang dan jasanya dititikberatkan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) ataupun koperasi yang dibentuk dan dibina langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dapat dikatakan Tomira atau koperasi ini merupakan pusat dari Program Bela Beli Kulon Progo. Produk BerasKu dihasilkan dari kerja sama Dinas Pertanian dan Pangan dengan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan mendistribusikan hasil produksinya melalui Bulog dan Tomira maupun koperasi kepada masyarakat Kulon Progo khususnya pegawai negeri sipil (PNS). Produk Batik Geblek Renteng, Gula Semut, dan hasil produksi lainnya merupakan hasil dari kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan industri batik, industri gula semut, dan industri kecil lainnya. Hasil produksi tersebut selanjutnya didistribusikan melalui Tomira/ koperasi. Produk AirKU dihasilkan dari oleh BUMD yaitu PDAM Tirta Binangun, yang didistribusikan melalui Tomira/ Koperasi.

Dalam pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo ini BUMD mempunyai peran penting dalam penyediaan modal bagi para

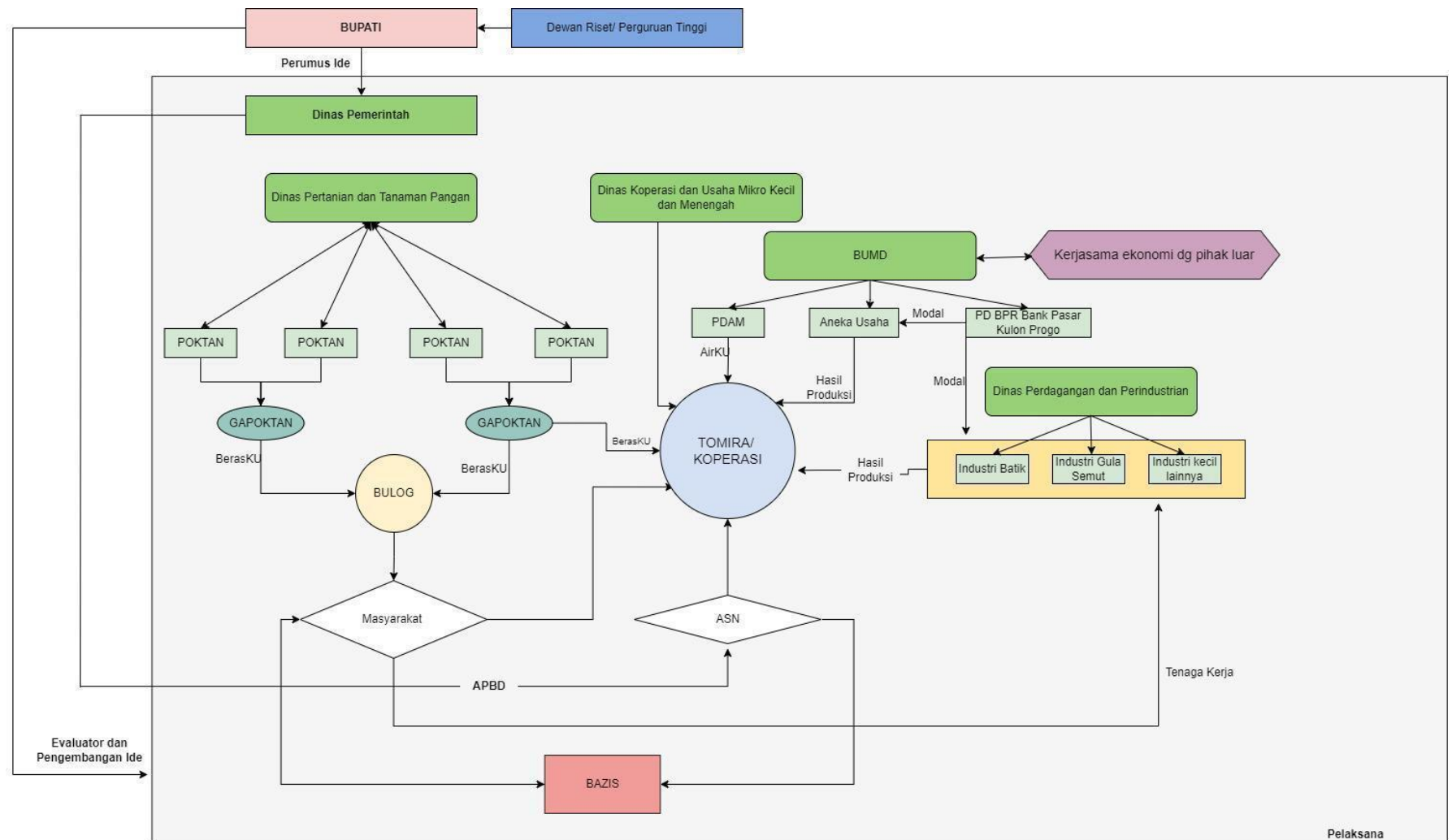


pelaku ekonomi lokal melalui Perusahaan Umum Daerah Bank Kulon Progo. Selain PDAM Tirta Binangun, BUMD yang tergabung dalam Bela Beli Kulon Progo diantaranya yaitu PT. Selo Adikarto (SAK) juga berkolaborasi dengan investor yaitu PT. Great Blue Whale dengan produksi beton dan PT. Panca Mitra dengan produksi batu pecah. Serta Perumda Aneka Usaha yang berkolaborasi dengan PT. Avicenna di bidang pengelolaan *rest area* dan PT. Sufi di bidang pengembangan teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya Bela Beli Kulon Progo juga bekerja sama dengan Bazis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. Bazis menjadi wadah bagi masyarakat khususnya ASN untuk berzakat ataupun berinfaq. Pada akhirnya dengan adanya Program Bela Beli Kulon Progo ini selain membawa nilai tambah pada produk yang dihasilkan, juga memberikan penambahan pendapatan asli daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Untuk lebih jelasnya mengenai jejaring para aktor dalam pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo dapat dilihat pada gambar 3.

Studi sebelumnya dalam (Sofhani, 2017) tentang peran jaringan antar aktor (institusi) dalam pengembangan industri kreatif di Cimahi, dijelaskan bahwa jejaring merupakan sebuah sumber penting bagi inovasi. Fungsi adanya jejaring antar aktor telah banyak menghasilkan pusat-pusat inovasi dunia seperti Silicon Valley di California, Bangalore di India, Zhingguancun di China, atau Daedeok Innopolis di Korea Selatan. Di mana pola interaksi aktor yang dikenal dengan konsep *quadruple helix*, dengan sinergi dari aktor pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat merupakan kunci dari berjalannya antar aktor (Sofhani, 2017). Seperti disebutkan dalam Sofhani (2017)

pemerintah menjadi peran sentral dan paling banyak berpengaruh terhadap jejaring antar aktor. Hal tersebut juga tercermin pada Bela Beli Kulon Progo dimana pemerintah khususnya leadership mempunyai peran penting yaitu kolaborator dalam pengembangan Bela Beli Kulon Progo (Sofhani, 2017).

Namun demikian dalam pelaksanaan Bela Beli Kulon Progo juga terdapat beberapa kendala terkait institusi. Institusi yang dimaksud dalam studi berfokus pada peran sektor publik dalam memberikan pengaruh terhadap efektivitas operasional masyarakat serta iklim kompetisi pada ekonomi wilayah. Berdasarkan studi Retnandari (2017), salah satu kendala berkaitan dengan kapasitas manajemen kewirausahaan untuk mengembangkan produk barang dan jasa dengan kualitas yang sama dengan kompetitor dan harga yang lebih rendah. Dalam hal ini proteksi regulasi saja tidak cukup dan membutuhkan profesionalisme dan manajerial yang kompeten. Salah satu pertimbangan dalam pengaturan institusi adalah karakteristik pemerintahan eksekutif dimana menurut Hambleton dalam Stimson *et. al* (2009) karakteristik manajer menyerupai manajer pada perusahaan privat yang dapat menimbulkan gap kepemimpinan. Namun bertolak belakang dengan argumen tersebut, manajer BUMD dan koperasi dipilih berdasarkan keanggotaan dan tidak secara profesional sehingga kurang memiliki antusias kewirausahaan (Retnandari, 2017).



Gambar 3. Jaringan Aktor Inovasi  
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dalam studi lain, Cahyono, Ma'arif dan Suharjono (2014) berpendapat bahwa kepemimpinan yang transformasional memberikan dampak positif dan signifikan pada perilaku bekerja karyawannya. Atmaja (2018) memperkuat argumentasi tersebut dan menambahkan poin bahwa perusahaan yang dipimpin dengan pemilihan secara kekeluargaan juga mampu berkompetisi dalam memproduksi barang dan jasa dengan perusahaan yang sepenuhnya profesional. Pemilihan pimpinan dengan profesional dapat memberikan keuntungan pada kinerja, namun dengan kekeluargaan juga mampu meningkatkan kinerja institusi. Wibowo dan Suseno (2017) dalam studinya membuktikan bahwa selain kepemimpinan, budaya organisasi dan profesionalisme pekerja juga memberikan dampak signifikan pada kinerja perusahaan. sehingga, selain kepemimpinan, faktor institusional seperti budaya organisasi yang kuat dan profesionalisme yang tinggi juga harus menjadi perhatian.

Argumentasi Retnandari (2017) sebelumnya yang menunjukkan bahwa antusiasme kewirausahaan dari BUMD dan koperasi masih kurang membuktikan bahwa faktor lain seperti budaya organisasi dan profesionalisme juga harus ditingkatkan dan tidak hanya terbatas pada kepemimpinan.

## **2.2 Leadership**

Kepemimpinan berdasarkan Burns dalam Stimson *et al.* (2006) adalah tindakan orang-orang dengan motif dan tujuan tertentu untuk memobilisasi dalam persaingan atau konflik dengan orang lain, institusional, politik, psikologis, dan sumber daya lainnya demi membangkitkan, melibatkan, dan memuaskan motif pengikut (Stimson, *et al.*, 2006). Kepemimpinan merupakan salah satu variabel yang mampu

mengonversi sumber daya menjadi barang/jasa yang memiliki nilai lebih sehingga meningkatkan daya saing dan lebih lanjut dapat mengurangi kemiskinan wilayah.

Di Kulon Progo, peran pemimpin menjadi faktor terwujudnya program yang didasari oleh permasalahan tingginya kemiskinan. Program diinisiasi oleh Bupati Hasto Wardoyo pada tahun 2013 sebagai perumus ide pencetus ide dan penyusun program; pelopor pelaksanaan program; pengarah, dan evaluator. Berdasarkan perspektif sosial psikologi, gaya kepemimpinan yang diimplementasi adalah demokratik karena dalam pelaksanaan program, bupati berkonsultasi dengan Dewan Riset Daerah yang merupakan aktor-aktor dari perguruan tinggi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa program ini mencoba untuk meningkatkan kekuatan bersama yang tidak hanya berfokus pada pemimpin namun kekuatan bersama.

Program mengadopsi konsep kepemimpinan dalam konteks pengembangan wilayah dimana kepemimpinan dilihat sebagai aksi dan hubungan yang kolaboratif antara institusi, masyarakat, perusahaan privat (Stimson *et al.*, 2006). Hal ini terlihat pada tahap implementasi kebijakan dimana bupati dibantu oleh organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta bekerja sama dengan BUMD.

Dampak positif dari adanya program adalah peran pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat (Karimahakim *et al.*, 2021) di mana sebagai timbal balik pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan menjadi aspek penting dalam aksi endogen yang membutuhkan aksi kolaboratif dari internal masyarakat. Perasaan memiliki oleh masyarakat terhadap

wilayahnya menjadi modal sosial awal yang kemudian diperkuat dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya (Rizkwanti, 2017). Sedangkan dampak negatif maupun kendala yang dihasilkan dari pengembangan program adalah peran pemimpin Hasto Wardoyo sebagai inisiator program Bela Beli Kulon Progo yang terlalu kuat. Kharisma sebagai panutan masyarakat menjadi faktor signifikan mengubah perilaku masyarakat. Namun di sisi lain perlu disadari bahwa para pemimpin politik memiliki keterbatasan periode kepemimpinan. Di Kabupaten Kulon Progo, Bupati Hasto Wardoyo telah melepas jabatannya untuk menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Hanafi, 2019). Jika tidak diatasi memungkinkan untuk memberikan dampak pada perilaku masyarakat.

Dengan adanya batasan waktu pada masa jabatan pimpinan, perlu ada perhatian pada keberlanjutan program yang didukung oleh kolaborasi berbagai institusi dan masyarakat. Diperlukan strategi tata kelola yang memastikan program terus berjalan dan mempertahankan iklim kewirausahaan yang sudah berjalan. Kegiatan kaderisasi menjadi strategi untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Beberapa peran pemimpin yang perlu dilatih dalam proses kaderisasi diantaranya fungsi inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan serta fungsi berkompetisi. Selain itu dalam perspektif manajemen, pemimpin perlu meningkatkan urgensi, memperkuat aksi dan memiliki visi Stimson et al (2009).

### **2.3 Entrepreneurship**

*Entrepreneurship* menjadi salah satu elemen penting dalam perkembangan wilayah. *Entrepreneur* dianggap sebagai mesin yang dapat menggerakkan suatu

wilayah dengan memberikan nilai tambah pada berbagai produk yang dapat meningkatkan daya saing dengan produk lainnya. Bupati Kulon Progo berperan sebagai *Regional Entrepreneur* yang memiliki visi bahwa Kabupaten Kulon Progo dapat menghasilkan produk yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki konsep Program Bela Beli Kulon Progo yang dibangun untuk menjadi ciri khas daerah dalam meningkatkan daya saing produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat mengikuti konsep inovasi yang telah disusun oleh pemerintah daerahnya.

*Entrepreneur* lahir dari ekosistem yang bisa menstimulasi lahirnya *entrepreneur* sehingga suatu ekosistem bisa menghasilkan *entrepreneur* lebih banyak dari ekosistem lain. Pemerintah bertugas untuk menstimulasi hal tersebut. Regulator adalah salah satu faktor penting dalam membentuk ekosistem.

Kebijakan Toko Milik Rakyat yang menyediakan 20% ruang untuk produk lokal, penggunaan batik Geblek Renteng untuk seragam, gerakan proberas yang memberdayakan petani lokal dalam mengganti beras raskin, produksi air mineral “AirKu”, dan dibantunya berbagai perizinan ekspor gula semut menimbulkan efek *local entrepreneurship*. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo semakin banyak yang ikut serta dalam kegiatan *entrepreneurship* karena pasar dari produk-produk yang mereka hasilkan telah difasilitasi pemerintah dalam bentuk Program Bela beli Kulon Progo.

Berbagai strategi yang telah dilakukan untuk memberikan nilai tambah produk lokal Kulon Progo diantaranya:

1. Regulasi penetapan produk yang menjadi produk unggulan Kabupaten Kulon Progo
2. Display produk lokal di Tomira

3. Kerjasama dan kemitraan pengembangan produk antar badan usaha (perhotelan, cafe, dll)
4. Fasilitasi sertifikat ekspor
5. Fasilitasi standar SNI dan standar mutu ISO
6. Pelatihan pengembangan produk dan bantuan peralatan

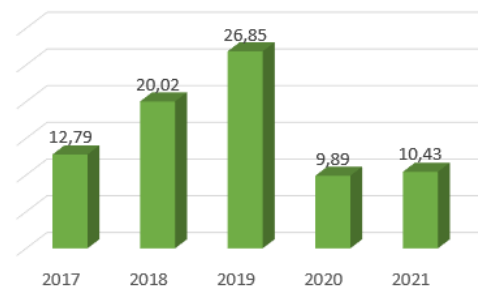
### 3. *Dependent Variable*

Program Bela Beli Kulon Progo memicu peningkatan daya saing wilayah yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa gerakan yang meningkatkan daya saing wilayah diantaranya gerakan proberas, batik geblek renteng, produksi air mineral “AirKu”, gula semut, dan Tomira.

Gerakan Proberas yang menginisiasi beras raskin diganti dengan beras daerah serta mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani (gapoktan) 10 kg per bulan menjadikan petani lokal di Kulon Progo berdaya dan memiliki pasar untuk mendistribusikan hasil pertaniannya. Terbentuk 12 Gapoktan yang membantu pemerintah dalam melakukan penyediaan atau pendistribusian program sosial. Para petani juga mengembangkan varietas baru untuk produksi beras premium Kulon Progo.

Omset penjualan batik geblek renteng terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak adanya kebijakan Bupati Kulon Progo yang mengharuskan pemakaian batik motif “Geblek Renteng” sebagai seragam pada hari tertentu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, dan Siswa SD/ SMP/ SMA. Hal ini memunculkan semangat produksi dari para

pengrajin batik khas Kulon Progo dan rasa bangga masyarakat yang mengenakan produk lokal daerah mereka sendiri. Kebijakan ini juga menghidupkan pengrajin batik yang sempat mati suri sejak tahun 1990-an seperti di Desa Ngentakrejo (Musfiroh, 2019). Penjualan batik produksi Kulon Progo dapat dilihat pada gambar 4.

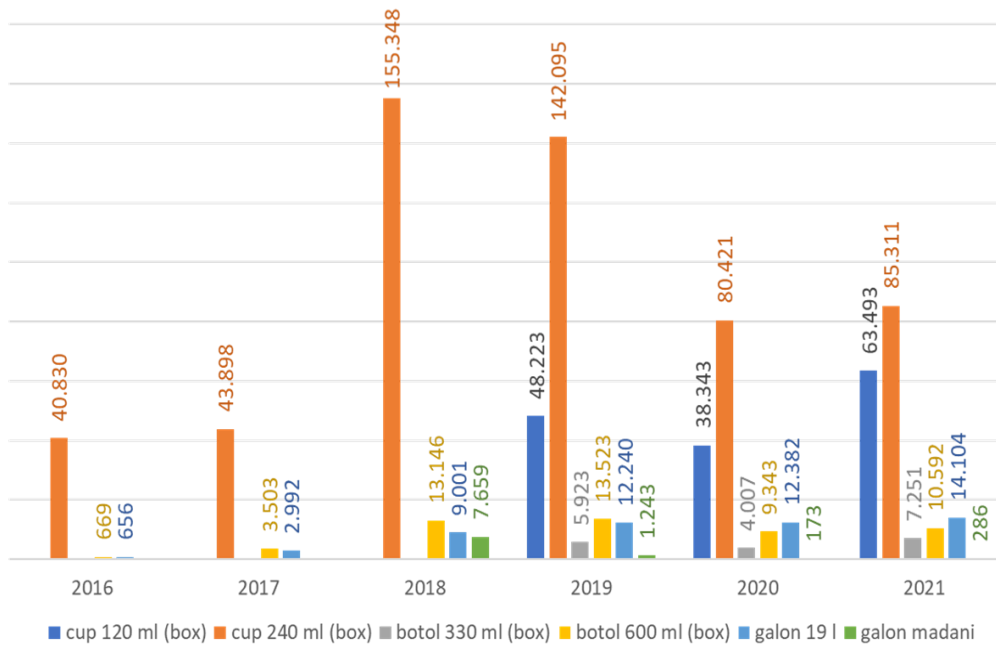


Gambar 4.

Penjualan Batik Geblek Renteng 2017-2021  
Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2022

Pada tahun 2020 omset batik mengalami penurunan karena adanya pandemi yang memberikan tekanan pada perekonomian masyarakat. Di Tahun 2021 omset mulai mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan karena kondisi pandemi masih belum terkendali di tahun 2021.

PDAM Tirta Binangun telah meluncurkan produk industri air mineral kemasan “AirKu” yang telah lolos sertifikasi SNI 01-3553-2006. Penjualan air minum (Airku) menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar kurang lebih 400 juta rupiah (Nugroho, 2020). Produksi dan penjualan AirKu cukup berhasil dan mengalami peningkatan sejak 2016 hingga 2019 dan menurun cukup signifikan akibat pandemi covid-19. selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Produksi AirKu 2016-2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2022.

Optimalisasi produk air minum dalam kemasan dari sumber mata air lokal ini mampu meningkatkan konsumsi produk lokal. Sebelumnya, masyarakat lebih sering mengonsumsi produk air minum kemasan merk nasional, dengan meningkatnya produksi dan konsumsi AirKu ini maka ekonomi lokal juga semakin terdorong.

Selain memproduksi air minum, PDAM juga menjawab permasalahan kesulitan air oleh petani kelapa di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Merbawani dan Rijanta (2016) menyebutkan bahwa PDAM turut menjadi penyuplai air bersih untuk rumah tangga di Kecamatan Kokap yang juga digunakan untuk keperluan pertanian (Merbawani dan Rijanta, 2016).

Gula Semut menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 458 Tahun 2015 tentang Gula Semut sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kulon Progo. Kapasitas produksi gula semut sebesar 2.238,5 ton/tahun dengan

90% konsumen pasar dari luar negeri. Negara tujuan ekspor gula semut yaitu Eropa, Jerman, Amerika, Chili, Cina, Asia, Amerika Selatan, Portugal, New Zealand, Switzerland, Denmark, Australia, dan Amerika Serikat. Realisasi ekspor gula Semut pada tahun 2020 sebesar 1.982 ton dengan nilai rupiah mencapai 5,7 miliar.

Kebijakan status pemilik modal Toko Milik Rakyat (Tomira) bukanlah perseorangan tapi milik koperasi, pihak swasta hanya diposisikan sebagai pemasok barang dan ketentuan produk lokal minimal harus 20% dari seluruh barang yang dijual di Tomira menstimulasi masyarakat menjadi kreatif dan inovatif dalam menciptakan berbagai produk. Tingkat kepercayaan diri masyarakat juga tinggi karena merasa Tomira adalah miliknya (Nugroho, 2020). Pelaksanaan Tomira ini dilaksanakan sesuai Perda nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern. Terdapat 33 unit toko modern yang diakuisisi oleh koperasi.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam program bela beli kulon progo memberikan dampak yang signifikan pada persentase kemiskinan turun yang secara drastis dari 23,31% (2012) menjadi 17,39% (2019).

Tabel 2.  
Persentase Kemiskinan Kulon Progo 2012-2019

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Kemiskinan	23,31	21,39	20,64	21,40	20,30	20,03	18,30	17,39

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2020

Sebelum program ini diluncurkan, persentase penduduk miskin hanya turun kurang dari 1% dari tahun 2005 - 2010 (Retnandari, 2017). Hasil yang memuaskan dari pelaksanaan program bela beli Kulon Progo selama lima tahun membuat pemerintah terus mengembangkan inovasinya dalam menciptakan pasar yang meningkatkan daya saing wilayah dari produk lokal masyarakat Kulon Progo. Pemerintah mengembangkan produk Kopi Menoreh sebagai produk unggulan Kabupaten Kulon Progo, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, kolaborasi investor dan BUMD, juga melakukan sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk dapat menekan tingkat kemiskinan serta kesenjangan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah untuk melindungi ekonomi lokal wilayah agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pasar, tapi juga dapat menjadi pelaku pasar yang bisa mengusahakan kesejahteraan di daerahnya sendiri sehingga produktivitas masyarakat meningkat dan persentase tingkat kemiskinan masyarakat menurun. Pemerintah memilih membuat mekanisme dengan menyediakan pasar bagi produk masyarakat bukan dengan subsidi agararganya bisa sejahtera.

### Kritik terhadap Program

Aspek kepemimpinan dalam pelaksanaan sebuah inovasi memang penting, akan tetapi perlu sebuah metode penerapan institusionalisme yang mampu untuk tetap menjalankan sistem inovasi walaupun sudah ada pergantian kepemimpinan. Seorang individu yang dominan menjadi pemimpin tidak akan selamanya dapat memimpin dalam wilayah tersebut, tetapi perlu menciptakan sebuah jejaring kekuasaan kolaboratif untuk menuju visi bersama yaitu peningkatan pembangunan wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Pembelajaran, perubahan dan adaptasi institusional harus terus berjalan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Adaptasi institusional ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal hal seperti ancaman bencana banjir (Bavel, Curtis dan Soens, 2018); dan adaptasi pemasaran barang dan jasa terhadap perubahan pola konsumsi pasar (Muhaimin dan Purnomo, 2021).

Aspek perencanaan menjadi poin strategis dalam pembangunan. Perencana, baik dari organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perencanaan maupun dari dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat, harus menciptakan sistem perencanaan kolaboratif yang selama ini dijalankan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Proses perencanaan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) harus merupakan proses

perencanaan yang benar-benar partisipatif yang mengakomodir proses *social learning*. Menurut Measham *et al.* (2014) proses *social learning* dengan *self-help ideology* sangat penting bagi masyarakat untuk menghadapi masalah dan memecahkannya secara kolektif tanpa bergantung dari pihak luar (Measham *et al.*, 2014). Peran para perencana adalah menganalisis permasalahan di wilayah tersebut dan menyampaikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih solusi yang paling baik untuk ditempuh oleh kebijakan di wilayahnya sendiri.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Sari, 2019; Retnandari, 2017; Nugroho, 2020) memberikan dukungan bahwa inovasi ini ditopang oleh 1 tokoh utama yaitu Bupati Kulon Progo. Dengan dilantiknya Bupati Hasto Wardoyo menjadi Kepala BKKBN pada 1 Juli 2019, maka keberlanjutan inovasi ini perlu dipertanyakan. Perlu disusunnya cetak biru strategi tata kelola yang memastikan program ini terus berjalan siapapun kepala daerahnya.

Merujuk pada teori pengembangan *endogenous* berbasis jejaring, wilayah bisa berkembang saat bisa meluaskan pasar ke wilayah lain, tidak hanya memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri. Semakin wilayah terkoneksi, semakin berkembang

wilayah tersebut. Oleh karena itu, perluasan pasar di luar wilayah Kulon Progo menjadi penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Perluasan pasar dan kerja sama dengan wilayah di sekitar Kulon Progo untuk menjadi pemasok produk dapat menciptakan *demand* yang tinggi dan peningkatan partisipasi berbagai sektor UMKM yang menciptakan *multiplier effect* signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan elemen-elemen pada kerangka pembangunan endogen oleh Stimson *et al.*, (2011), ditemukan hasil bahwa model pembangunan endogen yang dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo yaitu Bela Beli Kulon Progo telah memenuhi kriteria sebagai pembangunan endogen. Selain itu model pembangunan endogen ini berhasil menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Sebelum model pembangunan ini berjalan, yaitu pada lingkup waktu 2005-2012, rata-rata penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo berada pada 0,53% per tahun. Setelah model pembangunan endogen berjalan yaitu pada tahun 2013-2019, penurunan kemiskinan tiap tahunnya rata-rata berada pada 0,67%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2022*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2021). *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka*. Pengasih: BPS Kabupaten Kulon Progo.
- Barquero, A. (2002). *Endogenous Development: Networking, Innovation, Institutions and Cities*. London: Routledge.
- Bavel, B., Curtis, D., Soens, T. (2018). *Economic Inequality and Institutional Adaptation in Response to Flood Hazard: A Historical Analysis*. *Ecology and Society* 23 (4).



- Cahyono, U., Maarif, M., Suharjono. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Daerah Perkebunan Jember*. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 11 (2), pp 68-76.
- Hakim, M., dan Rahmat, A. (2020). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan: Strudi Kasus Program Bedah Rumah Kulon Progo*. *Journal of Community Empowerment* 1 (1). pp 1-11.
- Hanafi, R. (2019). *Bupati Kulon Progo Mundur Saat Menjabat, Ini Dia Calon Penggantinya*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4603970/bupati-kulon-progo-mundur-saat-menjabat-ini-dia-calon-penggantinya>. Diakses pada 26 April 2022 pukul 19.24.
- Hikmawati, E., dan Gutomo, T. (2016). *Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 15 (2). pp 131-144.
- Karimahakim, Khasanah & Bello (2021). *Analysis of the Kulon Progo Bela-Beli Program on the Economy*. *Journal of Asset Management and Public Economy*, Vol. 1, No. 1, 19-27
- Measham, T., et al. (2014). *Rethinking Rural Futures: Qualitative Scenarios for Reflexive Regional Development*. *Rural Society Journal* 21:3. pp 176-189.
- Merbawani, E., dan Rijanta, R. (2016). *Strategi Penghidupan Masyarakat Penghasil Gula Semut di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo*. *Jurnal Bumi Indonesia*. pp 1-10.
- Muhaimin, A., Purnomo, M. (2021). *Institutional Adaptation of Fruit and Vegetables Market toward the Growing Middle Class Income in Indonesia*. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12 (8), pp 3764-3780.
- Musfiroh, W. I. (2019). *"Bela Beli Kulonprogo" dan Implikasinya Bagi Karyawan di Industri Batik Sinar Abadi Desa Ngentakrejo*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 3, no. 1 (2019), hal. 119-140
- Nugroho, F. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Bela Beli Kulon Progo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2022). *Database Daerah Kabupaten Kulon Progo 2021*. Wates: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Putri, D. (2016). *Potensi Pengembangan Agroindustri Gula Semut di Kabupaten Kulon Progo*. *Prosiding Kearifan Lokal Nilai Adiluhung Batik Indonesia untuk Daya Saing Internasional*. Surakarta: 17 September 2016.
- Qowim, M. (2020). *Involusi Pembangunan Desa Endogen*. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 20 (1), pp 63-78.
- Rees, G. H., & MacDonell, S. (2017). *Data Gathering for Actor Analyses: A Research Note on the Collection and Aggregation of Individual Respondent Data for Mactor*. *Future Studies Research Journal: Trend and Strategies*, 9 (1), 115-137. <https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2017.v9i1.256>
- Retnandari, Nunuk. (2017). *Bela Beli Kulon Progo: A Policy for Strengthening The Capacity of Local Economy*. *Policy and Governance Review Vol 1 (2)*. 109-124.
- Rizkwanti, R. (2017). *"Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Endogen"*.

Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Sari, F. N. (2019). *Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Program “Bela Beli Kulon Progo”*. *Telaah Bisnis*, 20, 31-42.
- Sofhani, T. F. (2017). *Pengembangan Wilayah Berbasis Quadruple Helix: Analisis Jaringan Antar Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif Cimahi*. Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota. <http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota>
- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). *Regional Economic Development: Analysis and Planning*. Berlin: Springer Science & Business Media.
- Stimson, Robert., Stough, Roger R., Salazar, Maria. (2009). *Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Stimson, R., Stough, R. R., & Nijkmap, P. (2011). *Endogenous Regional Development Perspective, Measurement and Empirical Investigation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
- Susilo, G., dan Rijanta. (2017). *Kajian Implementasi “Bela Beli Kulon Progo” (Kasus: AirKU, Batik Geblek Renteng, dan Tomira)*. *Jurnal Bumi Indonesia*. pp 1-9.
- Vlados, C., dan Chatzinikolaou, D. (2020). *Growth Poles and Clusters: Are there Useful Analytical Complimentaries?*. *Journal of Business and Economic Research* 10 (1), pp 155-175.
- Wibowo, A., dan Suseno, D. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Profesionalisme terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 11 (1), pp 108-120.
- Widiyantoro, N. (2019). *Pemetaan Zonasi Potensi Airtanah di Kabupaten Kulon Progo Menggunakan Metode Tumpang-susun dengan Pendekatan Kuantitatif Berjenjang Tertimbang*. Tugas Akhir. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yogi, dkk. (2017). *Pengantar Ekonomika Wilayah: Pendekatan Analisis Praktis*. Bandung: ITB Press.